

BAB II

TINJAUAN TEORITIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN BERKELANJUTAN

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam dua tahun terakhir, pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) telah menunjukkan efektivitasnya dalam meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada penggalian potensi dan aset lokal yang dimiliki oleh komunitas, dari pada melihat kekurangan atau ketergantungan terhadap bantuan eksternal. Dalam konteks sosial-ekonomi desa, mampu menumbuhkan semangat kemandirian dan keberlanjutan melalui kolaborasi antarwarga dan optimalisasi aset yang tersedia. Berikut ini Beberapa judul penelitian yang berdekatan dengan penelitian yang peneliti lakukan;

Penelitian pertama dilakukan oleh Musda, Nurhidayati, dan Latif (2023) di Kampoeng Ce'de, Kabupaten Maros. Studi ini memanfaatkan pendekatan ABCD dalam pelatihan sistem vertical garden untuk memaksimalkan lahan sempit yang dimiliki petani. Aset yang dimanfaatkan meliputi dinding rumah, bekas kontainer, dan sistem irigasi sederhana. Melalui tahapan identifikasi aset, pelatihan, dan pendampingan, ditemukan bahwa 100% peserta memahami prinsip vertical garden dan 83,3% memahami sistem irigasinya. Penerapan teknik ini terbukti meningkatkan produksi sayuran rumah tangga dan memperkuat ketahanan pangan keluarga. Penelitian ini menunjukkan bagaimana pendekatan ABCD mampu

menghadirkan inovasi lokal berbasis teknologi sederhana yang berdampak langsung pada produktivitas pertanian.(Musda et al., 2023)

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh, Aradea, Sari, dan Hartanto (2023) melakukan penelitian di Desa Tegalrandu, Magelang, dengan fokus pada pemberdayaan kelompok wanita tani melalui pelatihan pembuatan kompos dari limbah organik rumah tangga.

Dalam proses ABCD, masyarakat diajak mengenali potensi limbah rumah tangga sebagai sumber pupuk organik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan membuat kompos, tetapi juga berdampak pada peningkatan kesuburan tanah dan hasil panen. Di sisi sosial, kelompok wanita tani menjadi lebih aktif dan percaya diri dalam mengambil peran dalam praktik pertanian berkelanjutan. Penelitian ini menyoroti peran penting perempuan dalam mendukung pertanian ekologis dengan pendekatan berbasis aset komunitas.(Aradea et al., 2023)

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rohmah dan Farransahat (2024) di Desa Bendung, Gunung Kidul. Fokus utama penelitian ini adalah revitalisasi sistem lumbung pangan tradisional dengan pendekatan ABCD. Mereka memetakan aset sosial, kelembagaan, dan fisik masyarakat untuk mengembangkan kembali sistem distribusi pangan desa yang berkelanjutan. Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan pangan berbasis komunitas ini berhasil meningkatkan ketahanan pangan, pendapatan, serta solidaritas sosial. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih teknis, studi ini memperlihatkan potensi ABCD dalam memperkuat

struktur sosial ekonomi dan kemandirian desa secara komprehensif.(Rohmah & Farransahat, 2024)

Keempat, penelitian yang berkaitan dengan pemberdayaan lembaga tani, Saripudin, Firmansyah, dan Sundari (2024) meneliti Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Mekarmukti di Kabupaten Bandung. Penelitian ini mengimplementasikan metode ABCD dalam pengelolaan kopi rakyat, dengan fokus pada penguatan kapasitas kelembagaan, pemasaran, dan jaringan antarpetani. Aset yang dimanfaatkan termasuk lahan hutan kemitraan, pengetahuan lokal budidaya kopi, dan koneksi pasar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menjadi lebih sadar akan nilai ekonomis kopi lokal, serta mulai membangun kerja sama yang lebih kuat antaranggota kelompok. Meski dampak ekonomi belum terukur secara kuantitatif, pendekatan ABCD terbukti efektif dalam mendorong transformasi kelembagaan dan penguatan value kopi lokal.(Saripudin et al., 2024)

Penelitian kelima dilakukan oleh Tyapradana dan Azizah (2023) di Desa Sumberwaru, Kabupaten Situbondo, dengan objek pemberdayaan peternak sapi Peranakan Ongole (PO). Studi ini masih pada tahap konseptual, namun telah mengidentifikasi aset biofisik (padang gembalaan, hijauan), sosial (kelompok peternak), dan legal (status tanah dan regulasi desa) yang relevan untuk pengembangan program pemberdayaan. Penelitian ini menyusun model pemberdayaan berbasis ABCD yang dirancang untuk diterapkan di desa penyangga Taman Nasional Baluran. Meskipun belum sampai pada tahap implementasi, penelitian ini penting karena menunjukkan fleksibilitas pendekatan ABCD dalam

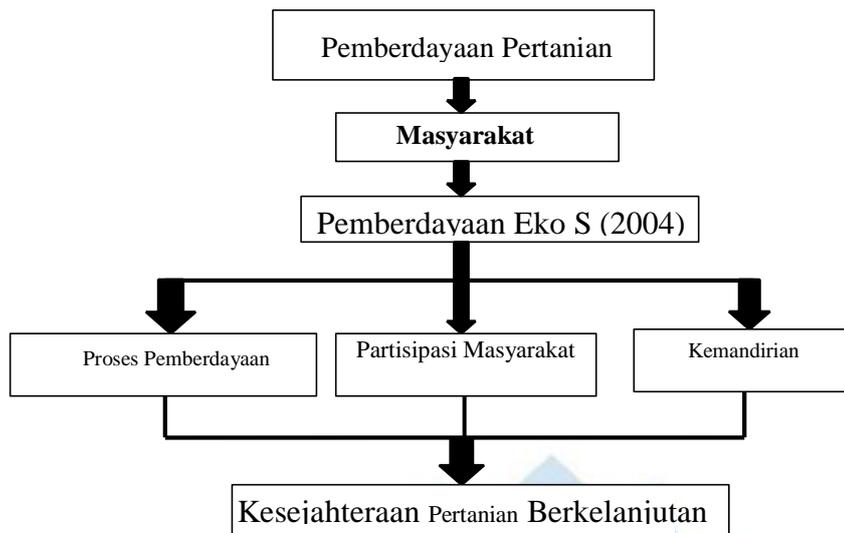
sektor peternakan, yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam kajian pertanian berkelanjutan (Tyapradana & Azizah, 2023).

Berdasarkan kelima penelitian tersebut secara umum menunjukkan bahwa pendekatan ABCD dapat diterapkan dalam berbagai konteks agraris, baik di sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, maupun peternakan. Kesamaan utama di antara penelitian-penelitian ini terletak pada tahapan sistemik yang meliputi pemetaan aset, pelibatan masyarakat, penyusunan rencana aksi, serta evaluasi berbasis partisipasi. Perbedaannya terletak pada skala, objek pemberdayaan, jenis aset yang digali, serta indikator keberhasilannya. Pendekatan ABCD terbukti memperkuat kesadaran masyarakat terhadap potensi lokal, menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap proses pembangunan, serta menciptakan transformasi yang lebih berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan ekologis.

2.2 Landasan Konseptual

Landasan konseptual suatu bentuk kerangka berfikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Berdasarkan teori yang digunakan, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Tabel 2.1 Landasan Konseptual



Sumber: Peneliti

Pada tabel 2.1 menyajikan suatu konstruksi sistemik dan terstruktur mengenai hubungan antara pemberdayaan pertanian dan tercapainya kesejahteraan berkelanjutan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal (*Asset Based Community Development/ABCD*). Model ini menampilkan keterkaitan hierarkis dan kausal antar komponen yang bermula dari penguatan sektor pertanian, keterlibatan aktif masyarakat, pendekatan pemberdayaan yang integratif, hingga pencapaian keberlanjutan sistem pertanian yang inklusif dan adaptif. Pada point-point diatas dapat dijelaskan sebagai berikut;

1) Pemberdayaan Pertanian sebagai Titik Awal

Pemberdayaan pertanian menjadi fondasi awal dari kerangka konseptual ini. Pertanian, sebagai sektor dominan di kawasan perdesaan, bukan hanya sumber penghidupan tetapi juga pilar ketahanan ekonomi dan ekologi desa. Proses

pemberdayaan ini meliputi penguatan akses terhadap input produksi, teknologi tepat guna, pelatihan budidaya, serta penguatan kelembagaan petani. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kapasitas petani agar mampu mengelola usaha tani secara efisien dan mandiri, serta adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika pasar (Chambers, 1994). Dalam penelitian ini mengedepankan teori dari Eko Sutoro, sebagai fokus dari penelitian menurut Eko Sutoro(2002) bahwa Pemberdayaan adalah sebuah gerakan dan proses yang berkelanjutan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, meningkatkan partisipasi, dan menciptakan kemandirian masyarakat.

2) Masyarakat sebagai Subjek Utama Perubahan

Masyarakat desa diposisikan sebagai aktor utama dalam proses pemberdayaan. Pendekatan ini menekankan bahwa masyarakat bukan sekadar penerima manfaat, melainkan pelaku aktif yang menentukan arah pembangunan. Partisipasi masyarakat penting untuk menjamin keberlanjutan program dan ketercapaian hasil yang relevan dengan kebutuhan lokal. Konsep ini sejalan dengan prinsip pengembangan komunitas yang partisipatif dan berbasis aset (Kretzmann & McKnight, 1993).

3) Pendekatan ABCD dalam Pemberdayaan

Pendekatan *Asset Based Community Development* atau yang disingkat ABCD adalah kerangka pemberdayaan yang mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan ekologis secara berimbang. Pendekatan ini bertumpu pada prinsip pembangunan yang berakar dari kekuatan lokal (ABCD), dengan fokus pada

penguatan modal sosial, manusia, dan lingkungan untuk mencapai daya tahan komunitas dalam jangka panjang (Mathie & Cunningham, 2003). Pemberdayaan semacam ini menghasilkan solusi lokal yang berkelanjutan dan memberdayakan.

4) Peningkatan Potensi Komunitas Lokal

Peningkatan potensi masyarakat difokuskan pada penggalan, pemetaan, dan pengembangan aset komunitas yang tersedia, seperti sumber daya alam, kearifan lokal, jaringan sosial, dan keterampilan warga. Dengan membalik paradigma pembangunan dari pendekatan berbasis kebutuhan (*needs-based*) ke pendekatan berbasis aset (*asset-based*), masyarakat didorong untuk memaksimalkan potensi lokal sebagai modal pembangunan (Green & Haines, 2016).

5) Penguatan Partisipasi Kolektif

Partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan dari perencanaan hingga evaluasi menjadi prinsip utama pemberdayaan. Partisipasi yang otentik dan bermakna menciptakan rasa memiliki dan memperkuat kapasitas kolektif. Harry Hikmat, (2000) membedakan berbagai tingkat partisipasi, mulai dari simbolik hingga partisipasi aktif yang transformatif. Dalam konteks ini, partisipasi interaktif menjadi model ideal karena menjamin keterlibatan sejati dan keberlanjutan intervensi.

6) Membangun Kemandirian Komunitas

Kemandirian adalah tujuan antara dalam proses pemberdayaan. Masyarakat yang mandiri mampu mengelola sumber daya, membuat keputusan kolektif, dan

menyelesaikan masalah tanpa ketergantungan pada pihak luar. Proses ini membutuhkan pembelajaran sosial yang terus-menerus dan penguatan kelembagaan lokal. Dalam sektor pertanian, kemandirian juga mencakup kemampuan petani untuk mengakses benih lokal, pasar yang adil, dan teknologi agroekologis (Suharto, 2005).

7) Tujuan Akhir Kesejahteraan Pertanian yang Berkelanjutan

Seluruh proses yang digambarkan bermuara pada pencapaian kesejahteraan pertanian berkelanjutan. Tujuan ini mencakup tiga dimensi utama: keberlanjutan ekonomi (keuntungan petani), keberlanjutan sosial (keadilan akses dan partisipasi), dan keberlanjutan lingkungan (konservasi sumber daya alam). Prinsip ini sejalan dengan panduan FAO, (2014) yang menekankan pentingnya transformasi sistem pangan yang efisien, inklusif, tangguh, dan adil.

2.3 Landasan Teoritis

- 1) Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan potensi dan aset kelompok tani

Secara etimologi potensi berasal dari bahasa latin yaitu potential yang artinya kemampuan atau kelebihan yang dimiliki oleh suatu daerah yang dapat dikelola atau dikembangkan.(Ensiklopedia indonesia). Potensi sumber daya manusia dalam konteks pemberdayaan masyarakat pertanian merujuk pada kemampuan, pengetahuan lokal, keterampilan, nilai-nilai sosial, serta semangat gotong royong yang dimiliki oleh masyarakat desa.

Potensi ini menjadi aset fundamental dalam pembangunan pertanian berkelanjutan karena masyarakat bukan hanya sebagai objek, tetapi juga subjek yang memiliki kapasitas untuk merancang, mengelola, dan mengembangkan kegiatan pertanian sesuai dengan kondisi lokalnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Sedarmayanti (2017:12), potensi SDM mencakup kemampuan dasar fisik dan non-fisik yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks Kampung Cipulus, potensi SDM dapat ditemukan pada masyarakat petani yang memiliki kearifan lokal, pengalaman turun-temurun, serta keterbukaan terhadap inovasi teknologi dan praktik ramah lingkungan. Potensi sumber daya alam dalam pembangunan pertanian berkelanjutan meliputi kesuburan tanah, ketersediaan air irigasi, kondisi iklim, serta keanekaragaman hayati yang dapat dimanfaatkan secara arif oleh masyarakat setempat. SDA bukan hanya menjadi sumber produksi, tetapi juga bagian dari ekosistem yang harus dijaga untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang.

Menurut Soemarwoto (2001:34), potensi SDA mencakup semua unsur lingkungan biofisik yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mendukung pembangunan. Dalam konteks Kampung Cipulus, SDA seperti lahan pertanian yang subur dan iklim yang mendukung pertanian hortikultura menjadi basis penting untuk pengembangan model usaha pertanian berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas pertanian berkelanjutan memerlukan pendekatan sistemik yang memadukan penguatan

sumberdaya manusia (SDM), dan pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) secara ekologis dan partisipatif. Salah satu strategi efektif adalah pngkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan manajerial yang relevan dengan praktik pertanian yang ramah lingkungan. Pelaksanaan sekolah lapangan pertanian, terbukti dapat meningkatkan pengetahuan petani dalam pengelolaan lahan secara efisien dan adaptif terhadap perubahan iklim (Sulaiman, R., Hall, A., & Raina, 2010). Selain itu, pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) memungkinkan masyarakat mengidentifikasi dan memaksimalkan aset lokal, baik berupa varietas tanaman lokal, praktik kearifan tradisional, maupun potensi kelembagaan desa, sehingga menghasilkan model pertanian yang berbasis kekuatan internal komunitas (Mathie, A., & Cunningham, 2003).

Dalam hal SDA, penerapan sistem pertanian terpadu, agroforestri, dan penggunaan input organik turut mendorong keberlanjutan ekosistem pertanian, menjaga kesuburan tanah, serta mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia (Altieri, 2002). Optimalisasi potensi tersebut perlu ditopang oleh penguatan kelembagaan lokal seperti koperasi tani atau BUMDesa untuk memperluas akses pasar dan distrsi hasil panen yang berkeadilan (Chambers., 1997).

Terakhir, adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti aplikasi pertanian digital juga menjadi instrumen strategis dalam mentransformasikan SDM pertanian tradisional menjadi petani yang adaptif, terhubung dengan pasar, serta responsif terhadap dinamika cuaca dan harga (World Bank, 2011). Dengan adanya pendekatan tersebut, pemberdayaan masyarakat tidak hanya meningkatkan

produktivitas pertanian secara berkelanjutan, tetapi juga memperkuat kemandirian dan ketahanan komunitas lokal.

2) Partisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani

Indikator yang paling penting dalam pemberdayaan masyarakat merupakan tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi memiliki makna keterlibatan. Partisipasi masyarakat bukan sekedar keterlibatan masyarakat dalam pembangunan saja. Partisipasi juga bukan sekedar alat atau mobilisasi untuk mencapai tujuan individu atau kelompok tertentu. Partisipasi merupakan sebuah proses dan tujuan dalam mencapai pembangunan. Partisipasi masyarakat terlibat secara aktif baik fisik maupun psikis (Dr. Oos M. Anwas, 2019).

Makna partisipasi dalam konteks penyuluhan pertanian misalnya, menurut Van den Ban dan Hawkins (1996) yang dikutip dalam (Dr. Oos M. Anwas, 2019) Hal ini menegaskan pentingnya keterlibatan aktif petani dalam pengambilan kebijakan di organisasi layanan penyuluhan, terkait tujuan, sasaran, dan metode, serta dalam evaluasi kegiatan. Alasan mengapa petani perlu terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam kegiatan penyuluhan. Menurut van den Ban Hawkins, alasan-alasan tersebut adalah: 1) petani memiliki informasi yang sangat penting untuk merancang program, 2) petani akan termotivasi untuk bekerja sama dalam program penyuluhan jika terlibat, 3) petani memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai sasaran, 4) banyak permasalahan pembangunan yang kompleks dan perlu dipecahkan bersama-sama.

Sementara itu, Chapin dikutip dalam (Abe, 2005) mengemukakan adanya bentuk partisipasi masyarakat, antara lain: (a) partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan; (b) partisipasi buah pikiran adalah partisipasi berupa sumbangan berupa ide, pendapat atau pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya; (c) partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama; dan (d) partisipasi representatif. Partisipasi yang dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Sementara itu menurut Uphoff dan Cohen, (1979:30), membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan keempat partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut bila dilakukan bersamasama akan memunculkan aktifitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial;

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan

orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan (Cohen dan Uphoff, 1979). Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Menurut Ndraha (1983) dan Cohen Hoff (1979), ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: pertama, menggunakan sumber daya dan dana. Kedua, kegiatan administrasi dan koordinasi, ketiga, penjabaran program. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan suatu program merupakan suatu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari kuantitas dilihat seberapa besar prosentase keberhasilan program yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

Menurut Ndraha,(1981) Keberhasilan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dapat diukur dengan beberapa indikator antara lain: a.Kontribusi/dedikasi stakeholder yang semakin meningkat dalam hal jasa (pemikiran, keterampilan) finansial, moral, dan material/barang. b.Meningkatnya kepercayaan masyarakat, terutama menyangkut komitmen pemerintah dalam hal peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. c.Meningkatnya tanggung jawab stakeholder terhadap penyelenggaraan negara terutama untuk kesejahteraan masyarakat.

3) Meningkatkan Kemandirian kelompok Masyarakat Tani

Kemandirian masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas individu dan kelompok dalam masyarakat agar mampu mengenali, mengelola, dan memecahkan masalah mereka secara mandiri, tanpa ketergantungan yang berlebihan pada pihak luar. Proses ini mencakup penguatan pengetahuan, keterampilan, akses terhadap sumber daya, serta keterlibatan aktif dalam mengambil keputusan terkait kehidupan mereka sendiri (Sutoro E., 2014)

Menurut Ife, J., & Tesoriero,(2006) kemandirian masyarakat merupakan inti dari pendekatan pembangunan partisipatif, dimana masyarakat lokal diberdayakan untuk mengambil peran aktif dalam mengarahkan proses

pembangunan, dengan memperhatikan nilai-nilai lokal, solidaritas sosial, dan keadilan. Kemandirian ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, politik, dan kultural yang saling berkaitan dalam sistem kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, upaya meningkatkan kemandirian masyarakat bukan hanya sekadar pemberian bantuan, tetapi lebih pada memfasilitasi tumbuhnya kapasitas dan kepercayaan diri masyarakat untuk bertindak atas dasar kekuatan dan potensi yang mereka miliki sendiri (Koesoemadinata R., 2018).

2.4 Pemberdayaan

a. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, (2024), pemberdayaan berarti proses, cara, atau perbuatan memberdayakan. Secara sederhana, pemberdayaan adalah tindakan atau upaya untuk membuat seseorang atau kelompok menjadi lebih berdaya, memiliki kemampuan, dan bisa bertindak secara mandiri. Istilah pemberdayaan atau pemberdayaan masyarakat sendiri banyak dikemukakan oleh berbagai pihak dan sering dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai inti dari upaya pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, pemberdayaan dapat dipahami sebagai proses meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan potensinya secara mandiri dan berkelanjutan.

Secara etimologis, pemberdayaan atau *empowerment* dalam bahasa Inggris memiliki dua makna, yaitu *to give power or authority*, yang berarti memberikan kekuasaan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain, dan *to give ability to*, yang berarti usaha untuk memberikan kemampuan atau menciptakan peluang bagi seseorang agar dapat mengaktualisasikan potensinya (Wrihatnolo, R. R., & Dwidjowijoto, 2007). Lebih lanjut, Susanto (2018) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat melalui dorongan, motivasi, serta pembangkitan kesadaran terhadap potensi yang dimiliki, dan kemudian mengembangkan potensi tersebut menjadi tindakan nyata (Susanto, 2018).

Sejalan dengan itu pemberdayaan, menurut Eko Sudarmanto (2002) menegaskan bahwa pemberdayaan merupakan suatu gerakan dan proses berkelanjutan yang bertujuan untuk membangkitkan potensi, memperkuat partisipasi, serta membangun peradaban dan kemandirian masyarakat. Senada dengan hal tersebut, Moeljarto menegaskan bahwa setiap masyarakat pada dasarnya memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Dengan itu, pemberdayaan merupakan suatu usaha yang tidak hanya membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimiliki, tetapi juga mengarah pada proses pengembangan potensi tersebut melalui pembelajaran yang terencana dan sistematis. Dapat di tegaskan bahwa pemberdayaan meruan proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran,

mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas.

Definis masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari bahasa Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009: 115-118).

b. Urgensi dan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mathews, dalam (Totok Mardikanto, 2022) menyatakan prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijaksanaan yang dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan dalam melaksanakan kegiatan secara konsisten. Dengan prinsip tersebut dapat dijadikan acuan pokok yang benar, bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Dari pemahaman pemberdayaan tersebut sebagai salah satu sistem pendidikan maka pemberdayaan memiliki beberapa prinsip sebagai berikut:

- 1) Mengerjakan, artinya pemberdayaan harus banyak melibatkan masyarakat untuk mengerjakan\menetapkan sesuatu. Karena melalui mengerjakan mereka akan

mengalami proses belajar (baik dengan pemikiran, perasaan, dan keterampilannya).

Yang kemudian akan diingat pada jangka panjang.

2) Akibat, kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat. Sebab, perasaan senang atau tidak senang akan mempengaruhi semangat untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan di masa-masa mendatang.

3) Asosiasi, setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan yang lainya. Sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan dan menghubungkan kegiatan dengan peristiwa lainya. Sebagai contoh, melihat cangkul orang lain diingatkan kepada pemberdayaan tentang persiapan lahan yang baik, melihat tanaman yang kurang subur, akan mengingatkannya pada usaha pemupukan yang subur.

c. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi pemberdayaan masyarakat menurut (Harry Hikmat, 2004) ada tiga strategi utama dalam perubahan sosial, yang *pertama*, strategi tradisional menekan pada kebebasan memilih kepentingan dengan sebaik-baiknya dalam berbagai kondisi. Kebebasan pada strategi tradisional bersifat umum sehingga dengan sendirinya melampaui wacana, namun akan muncul tindakan nyata yang keluar dari sekelompok orang yang berkuasa (strategi ini cenderung oligarkis). Kedua, *direct action* atau tindakan langsung, yaitu dimunculkannya dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak terlibat dan memiliki peluang besar untuk terjadinya perubahan.

Kondisi tersebut dapat diawali dengan kebutuhan dasar kolektif dari masyarakat, seperti keluar dari tuntutan reformasi agar dapat keluar dari krisis multidimensi. *Ketiga*, strategi pemberdayaan transformatif, yaitu strategi pemberdayaan yang berbasis pendidikan masyarakat secara partisipatif menekan kesadaran kritis untuk menjunjung nilai-nilai kebersamaan dan hubungan mutualisme antarwarga. Ketiga strategi tersebut memiliki peran penting dalam mendorong perubahan sosial, namun strategi transformatif menjadi pendekatan yang paling berkelanjutan karena mengedepankan partisipasi aktif masyarakat serta pembangunan kesadaran kritis yang mendorong solidaritas dan kemandirian.

d. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Edi Suharto (1998:220) menjelaskan pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu:

- a). Pendekatan *mikro*. Pemberdayaan dilakukan terhadap individu melalui bimbingan, konseling, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih individu dalam menjalankan tugas-tugas kesehariannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
- b). Pendekatan *mezzo*. Pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok masyarakat, pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan serta sikap-sikap kelompok agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.

c). Pendekatan *makro*. Pendekatan ini sering disebut dengan strategi sistem pasar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini.

e. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan adalah implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis masyarakat (*people centred development*). Terkait dengan hal itu, pembangunan, apapun pengertian yang diberikan terhadapnya, selalu merujuk pada upaya perbaikan mutu-hidup manusia, baik secara fisik, mental ekonomi maupun sosial-budayanya. Selaras dengan hal itu, dalam pembangunan pertanian, tujuan pemberdayaan diarahkan dalam perbaikan teknis bertani (*better farming*), perbaikan usaha tani (*better business*), dan perbaikan kehidupan petani dan masyarakatnya. Dari pengalaman pembangunan pertanian yang telah dilakukan di Indonesia selama tiga tahun terakhir, menunjukkan bahwa untuk memperbaiki ketiga bentuk perbaikan yang disebutkan di atas masih memerlukan perbaikan-perbaikan lain yang menyangkut (Deptan, 2002) dalam (Totok Mardikanto, 2022):

1) Perbaikan kelembagaan pertanian (*better organization*) demi terjalannya kerjasama dan mitra antar stakeholders. Sebagai contoh, dapat disampaikan pengalaman pelaksanaan infeksi khusus (INSUS), inovasi-sosial yang dilakukan melalui usahatani berkelompok mampu menembus kenaikan produktivitas yang dicapai melalui inovasi teknis.

2) Perbaiki kehidupan masyarakat (*better community*) yang tercermin dalam perbaikan pendapatan, stabilitas keamanan dan politik, yang sangat diperlukan bagi terlaksananya pembangunan pertanian yang merupakan subsistem pembangunan masyarakat (*community Development*).

Dalam hal ini, pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan pertanian tidak dapat berlangsung seperti diharapkan manakala petani tidak memiliki cukup banyak dana yang didukung oleh stabilitas politik dan keamanan serta pembangunan bidang dan sektor kehidupan yang lain. Sebaliknya, ketika pembangunan pertanian menjadi tidak berarti manakala tidak ada perbaikan pada kehidupan masyarakatnya.

3) Perbaiki usaha dan lingkungan hidup (*better environment*) demi kelangsungan usahatani. Dalam hal ini, pengalaman menunjukkan bahwa penggunaan pupuk dan peptisida secara berlebihan dan tidak seimbang telah berpengaruh negatif terhadap produktivitas dan pendapatan petani, dan kerusakan lingkungan hidup yang lain, yang dapat dikhawatirkan akan mengancam keberlanjutan (*sustainability*) pembangunan pertanian itu sendiri.

Mengacu pada konsep-konsep di atas, maka tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya dalam perbaikan sebagai berikut:

1) Perbaiki pendidikan (*better education*)

Dalam arti tertentu, pemberdayaan harus dirancang sebagai bentuk peningkatan pendidikan. Peningkatan pendidikan dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai bentuk meningkatkan pendidikan.

Artinya, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan semata, melainkan sebagai upaya strategis untuk membentuk kapasitas individu dan kolektif masyarakat dalam mengidentifikasi, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Dalam konteks ini, pendidikan memberdayakan berarti membuka ruang partisipasi aktif masyarakat untuk berpikir kritis, mengambil keputusan yang bijaksana, serta bertindak secara mandiri dan berkelanjutan. Proses ini juga mensyaratkan adanya pendekatan yang kontekstual, adaptif terhadap budaya lokal, serta berbasis pada potensi yang dimiliki oleh komunitas itu sendiri, sehingga pendidikan benar-benar menjadi alat transformasi sosial yang inklusif dan transformatif.

2) Perbaiki aksesibilitas (*better accessibility*)

Perbaiki aksesibilitas mengacu pada peningkatan kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, informasi, dan teknologi. Dalam konteks pemberdayaan, aksesibilitas yang baik memungkinkan masyarakat terlibat secara aktif dalam pembangunan karena mereka dapat menjangkau berbagai sumber daya yang sebelumnya terbatas. Peningkatan ini harus dilakukan dengan memperhatikan kesetaraan, terutama bagi kelompok rentan, agar tidak ada golongan yang tertinggal dalam proses pembangunan.

3) Perbaiki tindakan (*better action*)

Perbaiki tindakan menekankan pentingnya pergeseran dari sikap pasif menjadi aktif dalam menghadapi berbagai persoalan sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Tindakan yang dimaksud tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan terencana, berdasarkan analisis kebutuhan serta potensi lokal. Melalui

kapasitas reflektif dan partisipatif, masyarakat diharapkan mampu mengambil keputusan strategis yang berdam pada pngkatan kualitas hidup

4) Perbaiki kelembagaan (*better institution*)

Kelembagaan yang kuat meruan fondasi utama dalam proses pemberdayaan. Perbaiki kelembagaan mencakup restrukturisasi organisasi lokal agar lebih responsif, akuntabel, dan inklusif dalam pengambilan keputusan. Institusi yang sehat akan mendorong terciptanya tata kelola yang adil, transparan, serta mendukung kolaborasi lintas sektor yang dibutuhkan dalam pengembangan masyarakat secara berkelanjutan.

Kelembagaan yang kuat merupakan fondasi utama dalam proses pemberdayaan. Perbaiki kelembagaan mencakup restrukturisasi organisasi lokal agar lebih responsif, akuntabel, dan inklusif dalam pengambilan keputusan. Institusi yang sehat akan mendorong terciptanya tata kelola yang adil, transparan, serta mendukung kolaborasi lintas sektor yang dtuhkan dalam pengembangan masyarakat secara berkelanjutan.

5) Perbaiki usaha (*better business*)

Perbaiki usaha bertujuan untuk mngkatkan produktivitas dan keberlanjutan kegiatan ekonomi masyarakat. Ini mencakup pelatihan kewirausahaan, penguatan akses pasar, serta pendampingan dalam inovasi produk berbasis potensi lokal. Usaha yang dikelola dengan baik bukan hanya mngkatkan pendapatan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan memperkuat struktur ekonomi lokal.

6) Perbaiki pendapatan (*better income*)

Pendapatan yang meningkat mencerminkan hasil dari proses pemberdayaan yang efektif. Perbaikan pendapatan bukan semata soal jumlah, tetapi juga stabilitas dan keberlanjutan sumber-sumber penghasilan. Hal ini dapat dicapai melalui diversifikasi ekonomi, efisiensi produksi, serta integrasi kegiatan ekonomi lokal ke dalam rantai nilai yang lebih luas.

7) Perbaikan lingkungan (*better environment*)

Perbaikan lingkungan merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan. Melalui pendekatan pemberdayaan, masyarakat didorong untuk menjaga dan mengelola sumber daya alam secara bijak. Praktik-praktik seperti pertanian ramah lingkungan, konservasi air, dan pengelolaan sampah berbasis komunitas menjadi bagian dari strategi untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung kehidupan jangka panjang.

8) Perbaikan kehidupan (*better living*)

Perbaikan kehidupan merujuk pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, perumahan, dan relasi sosial. Hidup yang lebih baik tercapai ketika masyarakat memiliki akses terhadap layanan dasar, merasa aman, serta memiliki ruang untuk berkembang secara pribadi dan kolektif dalam lingkungan yang mendukung.

9) Perbaikan masyarakat (*better community*)

Perbaikan masyarakat merupakan hasil kumulatif dari transformasi di berbagai sektor. Masyarakat yang lebih baik ditandai dengan adanya solidaritas sosial yang tinggi, partisipasi aktif dalam pembangunan, serta kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Proses ini hanya dapat terjadi jika

pemberdayaan dilakukan secara partisipatif, berkelanjutan, dan berakar pada nilai-nilai lokal yang hidup dalam komunitas tersebut.

f. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Agar proses pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung secara optimal, diperlukan adanya intervensi yang dirancang secara sistematis. Intervensi ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang berfokus pada pengembangan masyarakat sebagai prasyarat menuju pemberdayaan yang berkelanjutan (Zubaedi, 2007). Adi (2013) menjelaskan bahwa proses pemberdayaan masyarakat mencakup beberapa tahap penting.

Tahap Pertama, tahap *engagement* atau persiapan, yang meliputi dua aspek: kesiapan petugas serta pnyjauan lapangan. Pada tahap ini, penyamaan persepsi dalam tim pelaksana menjadi krusial, disertai studi kelayakan terhadap wilayah sasaran, baik secara formal melalui jalur birokrasi maupun informal dengan membangun hubungan sosial dengan tokoh masyarakat.

Tahap kedua adalah *assessment*, yang bertujuan untuk menggali permasalahan dan kebutuhan masyarakat serta mengidentifikasi sumber daya lokal. Proses ini melibatkan partisipasi aktif warga agar persoalan yang muncul benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Tahap ketiga, yaitu *planning*, berfokus pada keterlibatan warga dalam menyusun alternatif solusi dan merumuskan berbagai kegiatan yang relevan.

Selanjutnya adalah tahap keempat, *formulation action plan*, di mana kelompok masyarakat bersama fasilitator menetapkan tujuan jangka pendek dan strategi pencapaiannya secara lebih konkret. Tahap kelima adalah *implementation*,

yang menjadi momen krusial karena realisasi kegiatan sangat bergantung pada sinergi antara pelaksana program dan warga. Tanpa kolaborasi yang kuat, pelaksanaan dapat menyimpang dari rencana awal.

Tahap keenam adalah *evaluation*, yang memungkinkan warga dan petugas untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap jalannya program. Evaluasi ini penting guna memberikan umpan balik dan mendorong terbentuknya sistem sosial yang lebih mandiri berbasis sumber daya lokal. Terakhir, tahap *termination* atau penghentian program, biasanya dilakukan ketika proyek telah mencapai batas waktu pelaksanaan atau ketika pendanaan telah habis. Meski demikian, terminasi bukan berarti masyarakat telah sepenuhnya mandiri, melainkan meruan bagian dari siklus program yang perlu ditutup secara formal (Adi Isbandi Rukminto, 2013).

2.5 Pertanian Berkelanjutan

a. Konsep Pertanian Berkelanjutan

Pembangunan dapat disebut berkelanjutan apabila mampu menjaga keberlangsungan dalam tiga indikator utama, yaitu ekonomi, ekologi, dan sosial. Keberlanjutan ekonomi mengacu pada kemampuan kegiatan pembangunan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga kelangsungan modal (*capital maintenance*), serta mengelola sumber daya dan investasi secara efisien. Dari sisi ekologi, keberlanjutan menuntut pelestarian ekosistem, pemeliharaan daya dukung lingkungan hidup, serta perlindungan terhadap sumber daya alam, termasuk keanekaragaman hayati. Sementara itu, dimensi sosial menekankan pentingnya distribusi manfaat pembangunan secara adil, peningkatan mobilitas sosial, penguatan solidaritas sosial, dan pengembangan kelembagaan. Dalam konteks pertanian,

pendekatan berkelanjutan yang diterima secara umum adalah yang mengintegrasikan ketiga aspek yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi sebagai fondasi utamanya.

Secara konseptual, pertanian berkelanjutan merujuk pada pendekatan yang mempertimbangkan tiga dimensi utama keberlanjutan, yakni keberlanjutan ekonomi (profit), keberlanjutan sosial (people), dan keberlanjutan lingkungan ekologis (planet). Dalam mengelola sistem pertanian agar selaras dengan prinsip keberlanjutan, terdapat lima indikator utama yang perlu diperhatikan: (1) keberlanjutan secara ekonomi yang menjamin kelayakan usaha, (2) praktik yang ramah lingkungan dan mendukung keseimbangan ekosistem, (3) penerimaan secara sosial yang mencerminkan keadilan sosial, (4) kesesuaian dengan nilai dan norma budaya setempat, serta (5) penerapan pendekatan sistemik dan holistik yang mempertimbangkan keterkaitan seluruh elemen dalam sistem pertanian secara menyeluruh.

b. Tujuan Pertanian Berkelanjutan

Pembangunan sektor pertanian yang dilandasi oleh prinsip kedaulatan pangan nasional seharusnya berakar pada nilai-nilai fundamental ideologi bangsa, yakni Pancasila. Dalam konteks ini, terdapat lima pilar utama yang menjadi fondasi kedaulatan pangan: (1) kedaulatan pangan yang berpijak pada nilai-nilai moral dan spiritual sebagaimana terkandung dalam prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) orientasi pada terwujudnya masyarakat Indonesia yang berkeadilan dan berperadaban; (3) penguatan semangat kebangsaan dan persatuan nasional melalui sistem pangan yang inklusif; (4) penerapan prinsip-prinsip demokrasi yang berbasis

pada kedaulatan rakyat dalam sistem pangan; serta (5) pengarusutamaan keadilan sosial dalam pembangunan pangan nasional bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam kerangka ini, kedaulatan pangan tidak sekadar dimaknai sebagai pencapaian target produksi dan produktivitas, melainkan sebagai strategi holistik yang mencerminkan cita-cita bangsa (Yuwono, 2011).

Tantangan pangan di masa depan diperkirakan akan menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian serius dari pemimpin nasional dan seluruh elemen masyarakat. Kompleksitas persoalan ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, gangguan terhadap produksi pangan akibat perubahan iklim dan konversi lahan pertanian, serta minimnya perhatian terhadap kebijakan investasi di sektor pertanian (Subejo et al., 2016).

Pembangunan pertanian yang berkelanjutan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan petani secara menyeluruh melalui optimalisasi hasil produksi pertanian, dengan tetap menjaga keseimbangan terhadap kapasitas dukung ekosistem. Pendekatan ini menekankan pentingnya kelestarian lingkungan agar proses produksi pertanian dapat berlangsung dalam jangka panjang tanpa menimbulkan degradasi ekologis (Budiasa, 2011)

Sebagaimana dikutip oleh Rachmawatie, et.al (2020), tujuan utama dari praktik pertanian berkelanjutan meliputi: (1) pelestarian dan peningkatan kualitas lahan serta perlindungan terhadap lingkungan, (2) jaminan pendapatan yang memadai bagi petani, (3) konservasi energi dalam proses produksi, (4) peningkatan produktivitas pertanian, (5) peningkatan mutu dan keamanan produk pangan, serta (6) penciptaan keseimbangan antara kesejahteraan petani dan faktor sosial

ekonominya. Sejumlah kajian ilmiah menunjukkan bahwa sistem pertanian berkelanjutan memiliki potensi yang lebih tinggi dalam meningkatkan produktivitas dibandingkan dengan sistem pertanian konvensional.

c. Upaya Pertanian berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan sistem pertanian yang berkelanjutan, diperlukan serangkaian tindakan strategis. Langkah awal adalah menjaga kelestarian sumber daya alam melalui efisiensi dalam penggunaan air dan tanah, pengelolaan limbah pertanian secara bertanggung jawab, serta pemupukan yang sesuai kebutuhan. Tidak hanya itu, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan seperti pemakaian pupuk organik, pengontrolan hama berbasis ekosistem, dan sistem irigasi pintar berbasis sensor, dapat menekan dampak negatif terhadap lingkungan.. Diversifikasi tanaman turut memegang peranan penting dalam menjaga keberlanjutan sistem pertanian. Dengan menanam berbagai jenis tanaman, petani dapat mengurangi risiko kegagalan panen akibat hama atau penyakit yang menyerang tanaman tertentu.

Pengelolaan limbah yang baik juga menjadi hal krusial agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Peran pendidikan dan penyuluhan kepada petani tidak bisa dikesampingkan. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengenai teknik budidaya yang berkelanjutan akan memperkuat kapasitas petani dalam menerapkan metode ramah lingkungan secara konsisten.

Selain itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, serta komunitas tani menjadi pondasi penting dalam membangun sistem pertanian yang berkelanjutan. Kolaborasi ini membuka jalan bagi pertukaran teknologi,

pengetahuan, dan dukungan sumber daya demi tercapainya tujuan bersama. Tidak kalah penting, dimensi sosial dan ekonomi harus mendapat perhatian serius. Kemudahan akses pasar, peningkatan kondisi kerja, serta pemberdayaan petani kecil adalah faktor utama dalam menciptakan keadilan dalam pembangunan pertanian (Siregar, 2023).

2.6 Pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD)

Dalam pendekatan pengembangan masyarakat berbasis aset, suatu pendekatan yang menekankan pengembangan masyarakat berdasarkan aset-aset yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri sebagai motor penggerak dalam pengembangan komunitas mereka. Pengembangan masyarakat berbasis aset menitikberatkan pada aset-aset yang dimiliki dan berupaya mewujudkan impian komunitas dengan mengandalkan aset-aset yang sudah dimiliki. Oleh sebab itu, Kretzmann & McKnight (1993); Mathie & Cunningham (2003) mengemukakan bahwa Pendekatan Berbasis Aset untuk Pengembangan Masyarakat adalah pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pengakuan kekuatan, bakat, kemampuan, dan sumber daya individu serta organisasi untuk menggerakkan dan membangun perubahan sosial dan ekonomi.

Dalam prosesnya, pendekatan *Asset Based for Community Development* yang di singkat ABCD, Pendekatan Berbasis Aset untuk Pengembangan Masyarakat menunjukkan bahwa ketika masyarakat memiliki pandangan positif terhadap aset-asetnya dan menyadari pentingnya pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, aset-aset yang dimiliki oleh komunitas akan berkembang seiring dengan proses pembelajaran dan pengembangan yang

dilakukan oleh komunitas dalam mewujudkan impian masyarakat. Pendekatan berdasarkan aset untuk Pengembangan Masyarakat ini menekankan bahwa ketika masyarakat bertumpu pada aset-aset yang ada dan bergerak bersama dengan aset-aset tersebut, pembelajaran dan pengembangan di dalam komunitas akan mengarah pada meningkatnya aset-aset masyarakat.

Dengan argument di atas, Healy (2006) pendekatan *Asset Based for Community Development* ABCD adalah pendekatan berbasis pada kekuatan yang menyelaraskan pembangunan dengan lingkungan sosial di komunitas. Selain itu, McCashen (2005) memandang ABCD sebagai sebuah pendekatan yang mengandalkan kebiasaan komunitas dengan filosofi berbasis aset. Selain itu, Fisher, Geenen, Jurcevic, & Davis (2009) berargument bahwa Pendekatan Berbasis Aset untuk Pembangunan Komunitas mendukung pemberdayaan dan pembangunan kapasitas serta mengurangi tingkat ketergantungan komunitas pada pihak eksternal. Sebagai pendekatan yang berfokus pada kekuatan komunitas, pendekatan Pengembangan Berbasis Aset untuk Komunitas juga mendukung komunitas untuk melakukan pembangunan kapasitas dengan mengandalkan kekuatan komunitas. Pengembangan Berbasis Aset untuk Komunitas menunjukkan bahwa ketika komunitas ingin tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, komunitas harus berpijak pada kekuatan dan kapasitasnya sendiri serta memiliki dorongan dari dalam komunitas atau yang dikenal sebagai *community driven development*.

Dalam artian lain, *Asset Based for Community Development* (ABCD) adalah bentuk aplikasi pengembangan komunitas yang bertumpu pada

pengembangan yang digerakkan oleh komunitas dengan mengkoneksikan dan menggerakkan aset-aset komunitas dalam mewujudkan visi komunitas. Hal ini sejalan dengan pendapat Mcknight (2017) bahwa manfaat ABCD adalah untuk membangun dan menunjang kapasitas warga lokal dalam mengenali aset-aset yang ada dan membuat aset-aset tersebut terhubung satu sama lain. Pada intinya, ABCD adalah sebuah pendekatan yang mendorong anggota komunitas untuk mengubah keadaan mereka dengan memanfaatkan aset yang ada dalam komunitas. Dengan memanfaatkan aset yang ada, ABCD mendorong anggota komunitas untuk menjadi agen perubahan melalui pola pikir yang positif. Harrison, Blickem, Lamb, Kirk, & Vassilev (2019) memberikan kesimpulan bahwa prinsip dan praktik ABCD terdiri dari empat hal: pertama, hubungan dan kepercayaan sebagai mekanisme menuju perubahan; kedua, timbal balik dan keterhubungan: “orang, bukan layanan”; ketiga, pertanggungjawaban dan pengurangan ketergantungan; dan keempat, model yang berkelanjutan (*sustainable*). Dalam pengklasifikasiannya, aset terdiri dari dua jenis, yaitu aset fisik dan aset non-fisik.

Pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) merupakan salah satu paradigma pemberdayaan masyarakat yang berpijak pada kekuatan dan potensi lokal komunitas. Berbeda dari pendekatan tradisional yang berangkat dari pemetaan masalah (*needs-based approach*), ABCD menekankan bahwa setiap komunitas memiliki aset yang bisa dimobilisasi secara sistematis, dapat menjadi penggerak utama pembangunan dari dalam.

Secara umum menurut Agus Afandi dkk.,(2022) Pendekatan ABCD dilaksanakan melalui lima langkah utama. Pertama, mengidentifikasi atau melacak

kelebihan atau potensi suatu komunitas. Untuk melakukan identifikasi dan pelacakan kelebihan komunitas, langkah yang diambil adalah melakukan wawancara apresiatif dengan komponen-komponen komunitas di dalam komunitas tersebut. Sebelum melakukan wawancara apresiatif, sebelum melakukan wawancara apresiatif, diperlukan pembentukan tim inti atau kelompok kerja yang akan berfungsi sebagai fasilitator atau tim penggerak di dalam kelompok masyarakat. Kelompok kerja ini dapat terdiri dari pemimpin komunitas, pemimpin agama, atau anggota komunitas lainnya. Kedua, melakukan pemetaan aset. Ketiga, melakukan kajian ekonomi komunitas. Keempat, menciptakan hubungan atau koneksi dari berbagai potensi yang dimiliki, membuat prioritas kegiatan termasuk pelaksanaan kegiatan, dan kelima, melakukan pemantauan dan evaluasi untuk menilai tingkat keberhasilan kegiatan atau perubahan yang diharapkan.

